

Integrasi Kompetensi Lulusan Pendidikan Formal Dan Non Formal Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Kediri

AB. Musyafa' Fathoni

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
musyafafatoni@iainponorogo.ac.id

Kadi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
kadizakaria@iainponorogo.ac.id

A. Nu'man Hakim

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
numanhakim@iainponorogo.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the background, formulation process, and implications of the policy integrating formal education graduation standards with madrasah diniyah at Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Kediri. In the context of pesantren that oversee formal educational institutions, challenges arise in determining graduate competency standards. On one hand, formal educational institutions have autonomous rights in setting graduation standards. On the other hand, pesantren uphold distinctive visions and missions that must be preserved, making the integration of both systems an inevitable necessity. This research employs policy theory with juridical, historical, and policy study approaches to understand how the integration of graduation standards is established and implemented. The findings indicate that the integration is driven by a shift in students' educational orientation within the pesantren and demands from both parents and the job market for graduates' competencies. The policy formulation process involves deliberations between pesantren administrators, madrasah diniyah, and formal educational institutions, with pesantren serving as the primary institution determining graduation standards. Additionally, a juridical approach is adopted by involving parents in the policymaking process, ensuring broad support from all stakeholders. The implications of this policy are evident in the increased public trust in pesantren education quality. This integration also steers pesantren toward achieving dual competencies, encompassing both religious knowledge and professional skills. This concept, referred to as "Double Competence," affirms that pesantren graduates not only possess strong Islamic understanding but are also equipped to compete in the professional world.

Keywords: *Integration, Graduate Competency, Double Competence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, proses penetapan, dan implikasi kebijakan integrasi standar kelulusan pendidikan formal dengan madrasah diniyah di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Kediri. Dalam konteks pesantren yang menaungi lembaga pendidikan formal, muncul tantangan dalam menentukan standar kompetensi lulusan. Di satu sisi, lembaga pendidikan formal memiliki hak otonom dalam

menetapkan standar kelulusan. Namun, di sisi lain, pesantren memiliki cita-cita dan misi khas yang harus dijaga, sehingga integrasi antara kedua sistem menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dengan pendekatan yuridis, historis, dan studi kebijakan untuk memahami bagaimana integrasi standar kelulusan tersebut terbentuk dan diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang integrasi ini berkaitan dengan pergeseran orientasi santri dalam menempuh pendidikan di pesantren serta adanya tuntutan dari wali santri dan pasar kerja terhadap kompetensi lulusan. Dalam proses penetapannya, kebijakan ini dirumuskan melalui musyawarah antara pengelola pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan formal, dengan pesantren berperan sebagai institusi utama yang menentukan standar kelulusan. Selain itu, pendekatan yuridis diterapkan dengan melibatkan wali santri dalam proses kebijakan, memastikan bahwa kebijakan ini mendapat dukungan dari seluruh pihak terkait. Implikasi dari kebijakan ini terlihat dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan pesantren. Integrasi ini juga mengarahkan pesantren pada pencapaian kompetensi ganda yang mencakup penguasaan ilmu agama dan keterampilan profesional. Konsep ini, yang disebut sebagai "Double Competence," menegaskan bahwa lulusan pesantren tidak hanya memiliki pemahaman keislaman yang kuat tetapi juga mampu bersaing dalam dunia profesional.

Kata Kunci: *Integrasi, Kompetensi Lulusan, Double Competence.*

Latar Belakang

Kompetensi lulusan sebuah lembaga pendidikan formal adalah target yang hendak dicapai oleh sekolah/madrasah dalam wujud kemampuan lulusan yang dihasilkan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.¹ Oleh karenanya, lembaga pendidikan formal memiliki hak untuk merumuskan kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskannya. Perdebatan akademik mengenai integrasi pendidikan formal dan nonformal berbasis pesantren telah menjadi wacana yang terus berkembang.² Sebagian akademisi berpendapat bahwa pendidikan pesantren harus mempertahankan tradisi keilmuannya yang berbasis kitab kuning tanpa perlu mengikuti standar pendidikan formal. Sementara itu, pandangan lain menekankan pentingnya adaptasi pesantren terhadap sistem pendidikan modern agar lulusannya memiliki daya saing di masyarakat. Integrasi antara pendidikan formal dan nonformal berbasis pesantren dianggap sebagai solusi untuk menjembatani dua pendekatan ini, tetapi tantangan dalam implementasinya masih menjadi bahan kajian.³

Perdebatan mengenai integrasi pendidikan formal dan nonformal dalam sistem pesantren terus menjadi wacana yang menarik perhatian para akademisi dan praktisi pendidikan. Di satu sisi, ada pandangan yang menegaskan bahwa pesantren harus mempertahankan tradisi keilmuan berbasis kitab kuning dan metode pembelajaran klasiknya tanpa harus mengikuti standar pendidikan formal yang berlaku secara nasional. Di sisi lain,

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

² Dunn, Willian Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Press.2000

³ Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015

muncul tuntutan agar pesantren mengadaptasi sistem pendidikan modern agar lulusannya memiliki daya saing yang lebih tinggi di berbagai sektor kehidupan, baik dalam bidang akademik, profesional, maupun sosial.⁴

Dalam praktiknya, terdapat fenomena kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap lulusan pesantren dan realitas kompetensi yang mereka miliki. Lulusan yang hanya menempuh pendidikan nonformal di pesantren sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses dunia kerja yang mensyaratkan sertifikasi akademik. Sebaliknya, lulusan pendidikan formal di lingkungan pesantren terkadang mengalami tantangan dalam mendalami kajian keislaman secara lebih mendalam. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya model pendidikan yang mampu mengintegrasikan dua sistem tersebut secara efektif, sehingga lulusan pesantren tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan yang kuat tetapi juga memiliki keahlian yang relevan dengan tuntutan profesional di masyarakat.⁵

Kajian sebelumnya telah membahas berbagai bentuk integrasi pendidikan di pesantren, namun masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana kebijakan integrasi standar kompetensi lulusan diterapkan secara spesifik di pesantren yang memiliki sistem ganda. Beberapa penelitian lebih banyak menyoroti aspek teoritis atau model ideal integrasi, tetapi belum banyak yang menggali secara mendalam proses perumusan kebijakan dan tantangan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi kebijakan integrasi kompetensi lulusan pendidikan formal dan nonformal di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Kediri.

Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah merupakan salah satu pesantren yang mengelola berbagai lembaga pendidikan formal, baik berbasis keagamaan maupun umum. Lembaga pendidikan formal berbasis keagamaan yang bernaung di bawahnya mencakup Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Sementara itu, lembaga pendidikan formal umum yang berafiliasi dengan pesantren ini meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski telah mengadopsi sistem pendidikan formal, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah tetap menitikberatkan pendidikan agama ala pesantren, sehingga kehadiran lembaga pendidikan formal di dalamnya bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya wawasan keilmuan santri tanpa menghilangkan identitas kepesantrenan.

Tantangan utama dalam integrasi ini terletak pada formulasi kompetensi lulusan. Lembaga pendidikan formal umumnya memiliki standar kompetensi yang ditentukan secara nasional, sementara pesantren memiliki tujuan dan misi khas yang berakar pada tradisi keislaman.⁶ Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang memungkinkan keduanya dapat berkompromi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi pesantren, tanpa mengabaikan kebutuhan akademik dan profesional santri.

Dengan fokus pada aspek kebijakan dan implementasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang integrasi standar kompetensi lulusan, memahami mekanisme

⁴ Saleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.; lihat juga. Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002.

⁵ Mas'ud, Abdurrahman. *Kyai Tanpa Pesantren: Potret Kyai Kudus*. Yogyakarta: Gama Media, 2013.

⁶ Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.

yang diterapkan dalam proses integrasi, serta mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap lulusan pesantren. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pendidikan pesantren yang lebih adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi keislaman yang menjadi ciri khasnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, historis, dan studi kebijakan untuk menganalisis penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di lembaga pendidikan formal dalam pondok pesantren. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelusuri aturan hukum terkait SKL, sementara pendekatan historis mengeksplorasi eksistensi lembaga pendidikan formal dalam komunitas pesantren serta motif pendiriannya. Studi kebijakan diterapkan untuk memahami faktor yang memengaruhi penetapan kebijakan serta implementasinya dalam standarisasi lulusan. Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Kediri, yang menaungi berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal. Informan utama meliputi pengasuh pesantren, pengelola lembaga pendidikan, alumni, serta santri.⁷

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dalam tiga tahap: deskriptif, terfokus, dan selektif, guna memahami dinamika pendidikan di pesantren. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai perumusan SKL, dengan pencatatan dan perekaman untuk keakuratan data.⁸ Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teknik dan sumber. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, baik saat penelitian berlangsung maupun setelahnya, dengan tujuan mendeskripsikan proses perumusan SKL serta faktor-faktor yang memengaruhinya, hingga membangun hubungan antar kategori dan hipotesis penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Kebijakan

Pada dasarnya, kebijakan merupakan suatu keputusan yang terdiri dari tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan, sedangkan prinsip dan aturan digunakan sebagai kerangka dan pedoman untuk menjalankan kebijakan supaya dapat diterapkan dengan baik.⁹ Kebijakan dalam organisasi sangat terkait dengan level manajemen dalam organisasi, yaitu *Top Management*, *Midle Management* dan *Operational Management*. Dengan demikian kebijakan juga dapat bersifat berjenjang yakni, Kebijakan manajemen tertinggi (*Top Management*), Kebijakan manajemen menengah (*midle management*), dan Kebijakan manajemen operasional (*Operational Management*).¹⁰

⁷ Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1998

⁸ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications. Inc., 2009.

⁹ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep Strategis dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Rinela Cipta (2008:75) Lihat, Willian N Dunn, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Press.2000:132

¹⁰ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep Strategis dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Rinela Cipta (2008:78)

Agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan baik, pihak pengelola (manajer) dapat mengikuti tahapan atau prosedur perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh William Dun. Prosedur tersebut meliputi: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, evaluasi kebijakan.¹¹ Tahap penyusunan agenda merupakan tahap krusial dalam tahapan perumusan kebijakan. Pada fase ini, minimal pembuat kebijakan melakukan tiga hal: (1) memutuskan dan membuat kesepakatan tentang sebuah kriteria, (2) Menentukan berbagai alternative yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek positif dan negative, kesulitan dan kemudahan, serta unsur kemanfaatan maupun kemudlaratan, (3) memilih dan mangajukan alternative terbaik yang paling mungkin dilakukan.

Tahap selanjutnya adalah tahap formulasi kebijakan. Tahap ini lebih bersifat teknis, sebab pengambil kebijakan menggunakan berbagai macam teknik analisis dalam menetapkan keputusan. Penetapan keputusan didasarkan atas berbagai alternative yang telah muncul pada tahap penyusunan agenda. Tahap berikutnya adalah tahap adopsi/legitimasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap untuk menetapkan satu alternatif solusi ditetapkan atau diadopsi sebagai putusan kebijakan yang selanjutnya dimintakan legitimasi dari komponen-komponen pengambil kebijakan.

Setelah mendapatkan legitimasi, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahapan implementasi adalah tahapan yang sangat menentukan apakah kebijakan itu berjalan atau tidak. Pada tahap implementasi, pengambil kebijakan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, diantaranya: (1) manusia (2) struktur, (3) proses adminstrasi dan manajemen, (4) sumbar dana, (5) sumber daya.¹²

Tahap terakhir penyusunan kebijakan adalah tahap evaluasi kebijakan. Tahap evaluasi ini dapat difungsikan sebagai: (1) *compliance*; yakni melihat apakah seluruh struktur organisasi mentatai dan melaksanakan semua perosedur, (2) *auditing*; yakni melihat apakah sasaran dan target telah tercapai atau belum, (3) *accounting*; yakni melihat secara kuantitatif perubahan di masyarakat pasca diimplemantasikannya sebuah kebijakan, (4) *explanation*; yakni memberikan uraian mengapa terjadi diskrepansi antara perencanaan dan inplementasi kebijakan.¹³

Pendekatan Perumusan Kebijakan

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan oleh pengelola organisasi (manajer) dalam merumuskan kebijakan, yaitu: Pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*), pendekatan ketenagakerjaan (*man-power approach*) dan pendekatan nilai imbalan (*rate of return approach*). Pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*) merupakan pendekatan perumusan kebijakan yang diinisiasi oleh adanya kebutuhan atau tuntutan masyarakat.¹⁴ Berbeda dengan pendekatan kebutuhan social, pendekatan ketenagakerjaan (*Man Power Approach*) didasarkan atas adanya pemikiran logis penentu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni di masyarakat. Karena itulah pendekatan ini

¹¹ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999), 24-25

¹² H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*,93

¹³ Ibid

¹⁴ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet II, 2006, 236

lebih bersifat *top down*. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan nilai imbalan (*rate of return approach*). Pendekatan ini mendasarkan pengambilan kebijakan atas pemikiran untung rugi. Pendekatan ini lebih bersifat ekonomi yang melihat efektifitas sebuah kebijakan dari sudut pandang keuntungan moneter dan material.¹⁵

Model Perumusan Kebijakan

Untuk lebih memudahkan melakukan analisis kebijakan penetapan standarisasi lulusan sekolah formal di lingkungan PP Al Mahrusiah, dalam penelitian ini digunakan dua model teori kebijakan, yaitu model inkremental dan model elite. Penggunaan dua model teori kebijakan ini didasarkan atas kemiripan teori dengan pola kebijakan di PP Al Mahrusiyah. Adapun dua model teori tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a) Model Inkremental. Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Uraian mengenai model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul “The Science of Muddling Through” yang menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut “disjointed incrementalism” atau disebut dengan model inkremental¹⁶. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model Elite. Model elite secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: yang mempunyai kekuasaan (dengan jumlah sedikit) dan yang tidak mempunyai kekuasaan (dengan jumlah banyak). Massa tidak berperan memutuskan kebijakan publik.
- 2) Elite yang memerintah tidaklah mencerminkan massa yang diperintah. Kebijakan mengalir dari kehendak elite. Rakyat hanya menjadi objek keinginan elite.
- 3) Gerakan nonelite yang membahayakan posisi elite harus dikendalikan secara kontinu untuk mencapai stabilitas dan menghindari revolusi.
- 4) Elite membagi konsensus atas nama nilai-nilai dasar dari suatu sistem sosial yang ada dan perlindungan dari sistem tersebut. Seperti, di Indonesia dasar konsensus elite adalah falsafah dan dasar negara Pancasila.
- 5) Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan masyarakat melainkan menonjolkan nilai kepentingan sekelompok orang yang berkuasa (elite). Perubahan dalam kebijakan publik bersifat tambal sulam (inkremental).
- 6) Elite lebih banyak memengaruhi massa daripada massa yang memengaruhi elite.

Paling tidak ada tiga implikasi sosial yang timbul akibat perubahan suatu kebijakan atau ditetapkannya kebijakan yang baru. *Pertama*, terjadinya perubahan struktur, lembaga, sistem, dan nilai dalam norma sosial. Implikasi kedua adalah adanya perubahan kemajuan dalam masyarakat. Setiap kebijakan baru pasti menginginkan kemajuan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Ketiga, kebijakan baru dapat dipastikan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru juga.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Taher A Razik, & Austin D. Swanson. *Fundamental Concept of Educational Leadership and Management*. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1995), 456.

Analisis Tentang Latar Belakang Penetapan Integrasi Standar Kelulusan Pendidikan Formal Dengan Madrasah Diniyah

Berdasarkan pada paparan data, pada dasarnya yang melatarbelakangi pengasuh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Kediri untuk mengintegrasikan standar kelulusan tiga lembaga, yakni sekolah formal, madrasah diniyah, dan pondok adalah adanya keinginan untuk mengembalikan arah pengembangan pondok kepada cita-cita awal masyayikh saat mendirikan Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Sebagai bagian dari Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah bercita-cita untuk melahirkan generasi muda (lulusan) yang *tafaqub fiiddin* dengan memiliki basis keilmuan yang komprehensif (keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum). Sebagaimana dijelaskan dalam sejarah pendirian Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah, KH Imam Yahya Mahrus sangat menginginkan lembaga pendidikan yang seimbang antara pengetahuan umum dan agama.

Jika kita menelisik sejarah perkembangan pesantren, kebijakan yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah untuk mengintegrasikan standar kompetensi lulusan tiga lembaga sebagai standar kompetensi lulusan pesantren merupakan kebijakan yang cukup tepat. Dalam sejarah perkembangan pesantren, salah satu yang menyebabkan pesantren dapat bertahan sampai saat ini adalah karakter budaya belajar yang dimiliki pesantren, salah satunya adalah budaya belajar secara tuntas. Karakter ini menjadikan sistem pembelajarn di pesantren tidak hanya transfer ilmu pengetahuan tetapi juga pembentukan kepribadian.¹⁷ Ketuntasan belajar ini yang menjadi kata kunci, bahwa dengan adanya kebijakan standar kelulusan yang tertintegrasi, maka ketika santri dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah benar-benar sudah melalui proses belajar yang tuntas.

Faktor lain yang melatar belakangi kebijakan integrasi standar kelulusan ini adalah adanya keinginan pengasuh agar santri yang lulus dari Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah memiliki dasar-dasar pengetahuan agama yang cukup. Karenanya standar minimal lulus Madrasah Diniyah Jenjang Tsanawiyah menjadi pilihan kebijakan yang tidak dapat ditawar. Keinginan pengasuh ini pada dasarnya bukan hal yang aneh, sebab memang *trade mark* pesantren adalah penguasaan ilmu agama. Hal ini pula yang menjadikan para ahli dalam mendefinisikan pesantren tidak jauh dari proses belajar dan penguasaan ilmu agama Islam.¹⁸

Keputusan harus lulus madrasah diniyah menjadi janggal terdengar karena diintegrasikan dengan kelulusan sekolah formal. Keputusan ini menjadi terkesan semakin janggal karena integrasi ini hanya terjadi di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah, dan tidak terjadi di pesantren lain, bahkan di unit-unit pesantren yang berada di bawah naungan Pondok

¹⁷ Lihat Husni Rahim, *Arab Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 150-152. Barton, mengutip pendapat Abdurrahman Wahid, mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan kharismatik yang cocok pada tahap-tahap awal pendirian pesantren, justru sering menjadi sumber kesulitan pada tahap-tahap pengembangan berikutnya. Seringkali gaya personal kiai menjadi *straight jacket* bagi para pembantu dan para penerusnya. Akibatnya, muncul ketidakgairahan di dalam perencanaan dan kecenderungan untuk larut secara alami serta berbagai faktor eksternal lainnya. Lihat Greg Barton, "Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid", dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, terj. Ahmad Suaedy, dkk. (Yogyakarta: LKiS, 2010), 252.

¹⁸ Lihat Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 80-81.

Pesantren Lirboyo secara keseluruhan selain Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Dalam konteks ini, keputusan integrasi standar kelulusan sekolah formal dengan madrasah diniyah menjadi pengikat upaya modernisasi pesantren sekaligus mempertemukan gagasan kaum modernis dan tradisional. Jika titik temu ini dapat diwujudkan dengan kebijakan integrasi standar kelulusan ini, maka apa yang dijelaskan oleh Ziemek tentang pengaruh modernis terhadap ortodok-tradisionalis mungkin bisa dipertemukan¹⁹. Artinya secara kelembagaan memang perkembangan pesantren di perngaruhi oleh kelompok modernis, namun dari aspek visi tetap pada jalur perjuangan pendiri awal pesantren yang mengutamakan penguasaan ilmu keagamaan Islam *ala* pesantren.

Di sisi lain, pengasuh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah tidak menutup mata atas keinginan-keinginan wali santri agar putra putrinya yang belajar di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah dapat memiliki ijazah formal. Keinginan-keinginan tersebut terkadang mendorong perilaku santri dan wali santri untuk lebih mementingkan pendidikan formal dibandingkan dengan pendidikan madrasah diniyah. Pengasuh an pengurus pondok pesantren merasakan bahwa mereka terkaan lebih takut tidak lulus pendidikan formal daripada tidak lulus pendidikan diniyah. Hal ini menjadi sumber keelisahan tersendiri bai penasuh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Di satu sisi pihak ponok pesantren ingin mempertahankan tradisi keilmuan *ala* pesantren, di sisi yang lain ada kebutuhan santri dan wali santri yang perlu diakomodir melalui lembaga pendidikan formal.

Standarisasi kompetensi lulusan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah dalam perspektif peneliti adalah bentuk kompromi untuk mengakomodir dua kepentingan tersebut. Dalam perspektif teoritik, standarisasi kompetensi lulusan tersebut merupakan bentuk layanan jasa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren.²⁰ Jika dilihat dari sudut pandang teori kebijakan, ada pergulatan pemikiran dan kondisi obyektif pondok pesantren yang melatarbelakangi pemegang otoritas di pondok pesantren untuk mengambil kebijakan berupa standarisasi kompetensi lulusan pondok pesantren.²¹

Peneliti mencermati adanya kegelisahan dan kekhawatiran dari pihak pengasuh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah akan terjadi perubahan arah dan tujuan pendidikan di pondok pesantren tersebut. Cita-cita awal pondok pesantren untuk mencetak kader-kader ulama bisa bergeser menjadi lembaga yang menampung pelajar yang hanya berminat menyelesaikan pendidikan formal. Dengan demikian, pengambilan kebijakan untuk menstandarisasi kompetensi lulusan di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah juga bisa dibaca sebagai sebuah kebijakan yang ilatarbelakangi oleh langkah antisipatif pondok pesantren terhadap perubahan zaman.

Analisis Tentang Proses Penetapan Kebijakan Integrasi Standar Kelulusan Pendidikan Formal Dengan Madrasah Diniyah

¹⁹ Lihat Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986), 250.

²⁰ Lihat kembali Yazid, *Pemasaran Jasa: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 1999), 32-33.

²¹ Lihat, Willian N Dunn, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Press.2000:131.

Keputusan untuk mengintegrasikan standar kelulusan diinisiasi oleh pengasuh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Gagasan ini selanjutnya dikomunikasikan dan di musyawarahkan dengan para pimpinan sekolah formal, diniyah dan pondok. Karena diinisiasi oleh pengasuh yang merupakan top manajemen, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan perumusan kebijakan integrasi standar kelulusan menggunakan pendekatan *man-power approach*. Pendekatan didasarkan atas adanya pemikiran logis penentu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni di masyarakat. Karena itulah pendekatan ini lebih bersifat *top down*.²² Kebijakan top down seperti ini dalam dunia pesantren lazim terjadi. Hal ini dikarenakan posisi kiai sebagai pengasuh dianggap memiliki otoritas yang tinggi, sehingga ketika menerapkan pendekatan ini, kiai sebagai pengasuh memiliki legitimasi yang kuat dalam membuat sebuah kebijakan.²³ Meskipun demikian proses-proses musyawarah juga tidak kalah lazim terjadi di pesantren.

Dalam teori kebijakan, pendekatan top down ini juga bukan sesuatu yang tidak efektif, namun justru dalam situasi dan kondisi tertentu justru pendekatan top down lebih efektif dari pada pendekatan yang lain. Hal inilah yang terjadi di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Kekhawatiran pengasuh terhadap perubahan orientasi santri dan wali santri dari mondok untuk belajar agama menjadi mondok untuk sekolah sambil belajar agama menjadi situasi yang dianggap perlu segera diantisipasi dan diputuskan secara top down.

Adapun dalam proses perumusan kebijakan sampai dengan penerapan pengelola Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah melalui beberapa tahap. Tahapan tahapan perumusan yang dilakukan oleh pengelola tidak jauh beda dengan tahapan yang dikemukakan oleh William Dunn. Tahapan tersebut meliputi tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.²⁴

Pada tahap penyusunan agenda pengasuh mengajak musyawarah jajaran pimpinan untuk meminta pendapat terkait gagasan pengasuh untuk mengintegrasikan standar kelulusan sekolah formal dengan madrasah diniyah serta pondok menjadi standar kelulusan Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Namun karena pendekatan yang digunakan adalah *man-power approach*, dalam tahap ini jajaran pimpinan lebih banyak menyampaikan alternatif dan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul bila kebijakan ini diterapkan bukan pada aspek apakah kebijakan integrasi kelulusan ini layak untuk diterapkan atau tidak. Di sinilah ada sedikit perbedaan teori yang dikemukakan oleh Dunn.²⁵ Pelaksanaan di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah seolah-olah terabaikan, karena formulasi kebijakan sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pengasuh tanpa menggunakan berbagai teknis analisis sebagaimana yang disarankan oleh Dunn.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setelah tahap agenda, pengelola langsung lompat pada tahap adopsi / legitimasi kebijakan. Tahap ini, merupakan tahap untuk menetapkan formulasi integrasi standar kelulusan untuk diadopsi sebagai putusan kebijakan.

²² Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet II, 2006, 236

²³ Ibid.

²⁴ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999), 24-25

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Karena pengambil keputusan adalah kiai dan pengasuh yang dianggap memiliki legitimasi yang kuat maka tidak perlu untuk mencari atau meminta legitimasi dari komponen-komponen lain. Sekali lagi di sinilah keistimewaan sistem pesantren.

Tahap berikutnya adalah tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini pengasuh menyerahkan implementasi kebijakan kepada pimpinan sekolah formal dalam hal ini kepala Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan serta kepala Madrasah Diniyah dan ketua Pondok. Secara teoritik, tahap implementasi ini perlu melibatkan berbagai macam perangkat pendukung seperti, perangkat politik, sosial hukum, maupun administratif agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.²⁷ Namun karena di sini adalah pesantren yang secara politik, sosial hukum maupun administratif berbeda dari organisasi publik lain maka relatif tidak perlu dukungan variabel-variabel tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi karena semuanya telah terwakili oleh sosok kiai yang memiliki otoritas dan legitimasi baik politik dan sosial yang dominan dan kuat.

Meskipun demikian, jajaran pimpinan yang mendapatkan amanah untuk mengimplementasikan kebijakan ini tetap menyiapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, diantaranya: (1) manusia (2) struktur, (3) proses administrasi dan manajemen, (4) sumber dana, (5) sumber daya.²⁸ Sebelum kebijakan disosialisasikan pengelola pondok mempersiapkan segala hal yang menjadi konsekuensi dari penerapan kebijakan integrasi lulusan ini seperti menyiapkan kamar dan fasilitas santri serta menyiapkan infrastruktur lain yang terkait dengan implementasi kebijakan.

Tahap terakhir yang mestinya dilakukan adalah tahap evaluasi kebijakan, namun sepertinya pengelola Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah belum melakukan tahapan evaluasi ini. Hal ini dikarenakan memang kebijakan ini baru berjalan satu periode sehingga belum dilakukan evaluasi kebijakan secara lengkap dan detail. Dari empat fungsi evaluasi kebijakan yang meliputi *compliance*, *auditing*, *accounting*, dan *explanation*,²⁹ baru fungsi auditing yang dapat dikatakan dilakukan oleh pengelola pesantren. Fungsi ini dilakukan oleh pengelola dengan melihat berapa persen tingkat penerimaan kebijakan, yang dapat diukur dari berapa persen santri yang tetap tinggal di pesantren meskipun sekolah formalnya telah lulus demi menyelesaikan madrasah diniyah minimal jenjang Tsanawiyah.

Adapun bila kita mencermati proses penetapan kebijakan integrasi standar kelulusan, dapat dikatakan bahwa model kebijakan tersebut lebih cenderung menyerupai model elite. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan ditentukan oleh pengasuh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah dan jajaran pimpinan lain yang merupakan elite pondok pesantren. Dikatakan menyerupai model elite, karena menurut peneliti perumusan kebijakan memang dirumuskan dan diputuskan oleh elite pesantren, namun dalam konteks ini elite tidak menganggap bahwa santri dan wali santri sebagai objek yang

²⁷ Ibid.

²⁸ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, 93

²⁹ Ibid.

harus mengikuti kepentingan elit semata.³⁰ Justru dasar pertimbangan pengasuh dan jajaran pimpinan yang merupakan kelompok elite di pesantren ini adalah keinginan untuk memberikan layanan terbaik kepada santri dan wali santri agar memiliki dobel ijazah dan dobel kompetensi. Jadi yang menyerupai model elite di sini adalah aliran kebijakannya saja, yakni dari elite kepada non elite.

Catatan kecil yang perlu ditambahkan di sini adalah walaupun peneliti mengidentifikasi proses penetapan kebijakan integrasi standar kompetensi kelulusan pendidikan formal dengan madrasah diniyah sebagai standar kelulusan Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah sebagaimana paparan di atas, namun bukan berarti dapat ditarik sebuah garis yang tegas terhadap kemungkinan proses penetapan kebijakan dengan bentuk yang berbeda. Sebut saja misalnya terkait pendekatan yang dilakukan dalam perumusan kebijakan.

Dalam kasus Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah yang menetapkan kebijakan standarisasi kompetensi lulusan yang cenderung melalui pendekatan *man power approach*, namun tidak bisa menafikan pendekatan lain sama sekali. Dengan melihat kembali latar belakang lahirnya kebijakan ini, maka peneliti juga melihat adanya pendekatan lain yaitu pendekatan *social demand approach*. Selain komponen-komponen pengasuh dan pengelola pendidikan, ada komponen lain yang ikut mendorong lahirnya kebijakan tersebut. Komponen yang dimaksud adalah wali santri dan santri yang menginginkan adanya kompetensi profesionalitas (melalui pendidikan formal) di samping kompetensi keagamaan (melalui pendidikan madrasah diniyah). Persoalannya terletak pada pendekatan mana yang bisa dianggap lebih dominan. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa pendekatan *man power approach* jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan *social demand approach*.

Catatan lain yang perlu ditambahkan di sini terkait model perumusan kebijakan. Di atas telah dipaparkan bahwa bila dilihat dari aliran perumusan kebijakan, dapat dikatakan mirip dengan model elite. Namun peneliti juga tidak menafikan adanya model inkremental dalam perumusan kebijakan standarisasi kompetensi lulusan di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Disebut lebih mirip dengan model elit karena kebijakan tersebut diinisiasi oleh penasuh pondok pesantren sebagai pemegang otoritas tertinggi. Namun perlu diingat bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sebelumnya yang menghendaki sistem pendidikan di pondok pesantren tersebut tetap pada jalur *tafaqquh fiddin*. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit.³¹

Analisis Tentang Implikasi Penetapan Kebijakan Integrasi Penetapan Standar Kelulusan Pendidikan Formal Dengan Madrasah Diniyah

Dalam teori sosial disebutkan bahwa jika terjadi perubahan kebijakan atau ada penerapan kebijakan baru, pasti ada implikasi yang terjadi. Implikasi tersebut dapat mengenai

³⁰ Taher A Razik, & Austin D. Swanson. *Fundamental Concept of Educational Leadership and Management*. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1995), 456

³¹ Taher A Razik, & Austin D. Swanson. *Fundamental Concept of Educational Leadership and Management*. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1995), 456.

segala komponen sosial yang berkaitan dengan penerapan kebijakan baru tersebut.³² Hal ini juga terjadi pada Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah saat menerapkan kebijakan mengintegrasikan standar kelulusan dalam satu standar kelulusan pondok.

Salah satu implikasi positif yang ditimbulkan adalah adanya dobel kompetensi yang dimiliki oleh santri. Adanya keharusan lulus madrasah diniyah minimal jenjang tsanawiyah, membuat santri memiliki dua ijazah. Pertama ijazah sekolah formal Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kedua ijazah madrasah diniyah minimal jenjang Tsanawiyah. Implikasi ini dalam teori perubahan sosial dapat dikatakan sebagai implikasi kemajuan, sebab dengan kebijakan baru ini santri menjadi memiliki dua ijazah sekaligus, yang sebelumnya tidak semua santri memiliki dobel ijazah. Namun implikasi kemajuan yang lebih penting adalah kebijakan baru ini memberikan jaminan kualitas bahwa lulusan Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah dapat dipastikan menguasai pengetahuan agama yang cukup dan menguasai pengetahuan umum sesuai jenis sekolah formalnya. Dua jaminan ini menjadi implikasi maju yang paling utama dari penerapan kebijakan integrasi standar kelulusan.

Secara teoritik, ada tiga implikasi yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan: *Pertama*, terjadinya perubahan struktur, lembaga, sistem, dan nilai dalam norma sosial. *Kedua*, adanya perubahan kemajuan dalam masyarakat. *Ketiga*, kebijakan baru dapat dipastikan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru juga.³³ Kajian teoritis ini dapat digunakan untuk memotret dan menganalisis dampak dari kebijakan menintegrasikan standar kompetensi lulusan yang ada di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah.

Merujuk pada data yang diperoleh di lapangan, penerapan kebijakan integrasi standar kompetensi lulusan di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah menyebabkan perubahan pada struktur, lembaga, sistem, dan nilai atau norma yang berlaku di dalam pondok pesantren tersebut. Penelusuran historis menunjukkan bahwa pada awalnya lembaga-lembaga pendidikan formal di bawah naungan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat otonom dalam menentukan kelulusan peserta didiknya. Namun dengan diberlakukannya kebijakan integrasi standar kompetensi lulusan, pihak pengelola lembaga pendidikan formal tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana kewenangan yang dimilikinya sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Kewenangan lembaga pendidikan formal terkait kelulusan siswanya akan sangat bergantung pada rekomendasi dari madrasah diniyah dan pengurus pondok pesantren. Jika dua lembaga tersebut tidak memberikan rekomendasi, maka lembaga pendidikan formal tidak bisa meluluskan siswanya.

Dari sini dapat dilihat adanya perubahan dalam struktur kelembagaan serta norma-norma yang mengatur kehidupan antar lembaga (lembaga pendidikan formal, madrasah diniyah, dan pondok pesantren) akibat diberlakukannya kebijakan integrasi standar kompetensi lulusan. Yang menarik dari relasi antar lembaga pasca diberlakukannya kebijakan tersebut adalah posisi pondok pesantren dan madrasah diniyah yang determinatif dalam menentukan kelulusan siswa. Bahkan untuk sekedar kenaikan siswa dari satu tingkat ke

³² Lihat Syamsidar, "Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Pendidikan", dalam *Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Nomor 1 Desember 2015 : 83-92.

³³ Syamsidar, "Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Pendidikan", dalam *Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Nomor 1 Desember 2015 : 83-92.

tingkat berikutnya, lembaga pendidikan formal harus taat pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak madrasah diniyah dan pondok pesantren.

Implikasi lain adalah munculnya kemajuan dalam sosio kultural masyarakat pesantren. Secara kuantitatif, kebijakan integrasi standar kompetensi lulusan yang diterapkan di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah memicu bertambah banyaknya jumlah santri di pondok pesantren tersebut. Kondisi semacam ini bisa juga dimaknai sebagai bentuk kepercayaan wali santri terhadap model pendidikan yang diterapkan oleh pondok pesantren. Jika kebijakan tersebut dianggap merugikan, seharusnya yang terjadi adalah para wali santri menarik putra putrinya keluar dari pondok tersebut. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka tidak mempersoalkan putra putrinya menempuh waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren.

Secara kualitatif kemajuan masyarakat pesantren sebagai akibat dari kebijakan integrasi standar kompetensi lulusan yang diterapkan di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah dapat dilihat dari terciptanya keseimbangan kemampuan santri dalam menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Keilmuan santri di bidang agama dijamin melalui kewajiban mereka menuntaskan pendidikan di madrasah diniyah minimal tingkat Tsanawiyah. Sementara keilmuan santri di bidang ilmu umum yang mengarah pada profesionalitas dijamin melalui lembaga pendidikan formal. Keseimbangan kemampuan santri dalam menguasai ilmu agama dan ilmu umum inilah yang menurut peneliti menjadi pembeda Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah dari pondok pesantren-pondok pesantren sejenis yang menyelenggarakan pendidikan formal di dalamnya.

Disamping implikasi kemajuan, perubahan kebijakan juga memicu munculnya persoalan baru. Diantara persoalan yang muncul adalah kurangnya kamar serta fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kehidupan harian santri. Yang kedua adalah perlunya pesantren menyediakan perguruan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan santri yang telah lulus sekolah formal namun belum lulus madrasah diniyah. Selain itu ada juga implikasi yang mengenai wali santri, yakni implikasi bertambahnya biaya pendidikan yang harus ditanggung karena bertambahnya masa belajar di pondok pesantren.

Munculnya persoalan-persoalan ini jika tidak segera diselesaikan dapat berakibat pada terganggunya realisasi kebijakan, bahkan bisa berimplikasi pada menurunnya santri di masa-masa mendatang. Dan jika ini terjadi maka kebijakan baru yang diharapkan dapat memberikan solusi, justru menjadi kontra produktif.³⁴

Tentu saja persoalan-persoalan tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Penerapan kebijakan menintegrasikan standar kompetensi lulusan pada akhirnya memberi peluang baik terciptanya kemajuan di satu sisi. Di sisi yang lain, kebijakan tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Integrasi standar kelulusan pendidikan formal dengan madrasah diniyah di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah berakibat pada perubahan

³⁴ Ibid.

orientasi santri dalam menempuh pendidikan. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pendidikan diniyah sebagai inti pesantren semakin tersisih oleh pendidikan formal yang sifatnya lebih suplementer. Untuk menjaga visi awal para pendiri, pesantren merancang kebijakan yang menyeimbangkan keduanya. Selain itu, tuntutan dari wali santri dan kebutuhan lapangan kerja turut mendorong langkah ini, agar lulusan memiliki kompetensi keagamaan yang kokoh sekaligus kecakapan akademik yang relevan dengan dunia kerja.

Kebijakan integrasi ini ditetapkan melalui serangkaian musyawarah yang melibatkan pengelola pondok pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan formal. Dalam prosesnya, pondok pesantren tetap mempertahankan peran dominan dalam menentukan kriteria kelulusan. Pendekatan yuridis juga diterapkan dengan melibatkan wali santri sebagai pihak yang berperan dalam kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan ini terlihat dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan pesantren. Selain itu, lulusan pesantren tidak hanya memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dibekali kompetensi profesional yang mempersiapkan mereka untuk berbagai peluang di masa depan. Konsep ini dirumuskan sebagai “Double Competence,” yang mencerminkan integrasi antara pendidikan diniyah dan keahlian akademik yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Asrohah, Hanun. *Pelembagaan Pesantren: Asal-usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Azizy, Qodri Abdillah. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.
- _____, Azyumardi. *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1998
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
- _____, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Burhanudin, Jajat dan Ahmad Baedowi. *Transformasi Otoritas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Coombs, P.H. and Ahmed, M. New. *Paths to Learning for Rural Children*. New York: International Centre for Educational Development, 1973.
- Connolly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khorri. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications. Inc., 2009.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- _____, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Al-Fadani, Muhammad Yasin Ibn Muhammad 'Isa. *Al-'Aqd al-Farid min Jawābir al-Asānid*. Surabaya: Dar al-Tsaqafi, tt.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications. Inc., 2009
- Dunn, Willian N 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Press.2000
- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changng Role of Cultural Broker" dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol. 2, edisi 2, tahun 1960.
- Haedari, Amin, dkk. *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD Press, 2006.
- _____, H.M. Amin. *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- _____, HM Amin, dkk. *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD Press, 2006.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Hasbullah, H.M. *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*.
- Hielmy, Irfan. *Wacana Islam*. Ciamis: Pusat Informasi Pesantren, 2000.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa Jakarta: P3M, 1987.
- Khoirudin, Untung. *Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren: Studi Multi Kasus Pesantren Ar Risalah Lirboyo, Wabidiyah Kedunglo Bandar Lor, Wali Barokah Burengan Di Kota Kediri*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
- Langgulang, Hasan. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988.
- Lukens-Bull, Ronald Alan. *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*, terj. Abdurrahman Mas'ud, dkk. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mas'ud, Abdurrahman *Kyai Tanpa Pesantren: Potret Kyai Kudus*. Yogyakarta: Gama Media, 2013.
- Patton, M.Q. *Qualitative Evaluation Methods*. London : Sage Publication, 1980
- Porter, Michael A. *Competitive Strategy: Techniques For Analyzing Industries And Competitors*, New York: The Free Press, 1980
- Prasodjo, Sudjoko, dkk. *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3ES, -.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.
- _____, M. Dawam. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1985.

- Rahardjo, Mudjia. *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pengetahuan*. Malang: Cendekia Paramulya, 2002.
- Rahim, Husni. *Arab Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.
- Saleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
- Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet II, 2006
- Sallis, E. *Total Quality Management in Education*. Terjemahan oleh Ahmad Ali Riadi dan Fahrurrozi. Jogjakarta: IRCiSoD, 200.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Syukur, Fatah. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial* terj. Alimandan. Yogyakarta: Prenada Media Groub, 2008.
- Tilaar, H.A.R. *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar*, Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Tim Pembukuan Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien. *I'lal al-Istilahiy wa al-Lughawiy fi 'Ilm al-Şarf*. Kediri: Madrasah Hidayatu Muhtadi-ien, tt.
- Tim Penyusun. *Pesantren Lirboyo: Sejarah, Peristiwa, Fenomena, dan Legenda*. Kediri: BPK P2L bekerjasama dengan Lirboyo Press, 2015.
- Tim Sejarah BPK P2L. *3 Tokoh Lirboyo*. Kediri: BPK P2L bekerjasama dengan LTN, 2011.
- Tim Pembukuan Historiografi, *Historiografi Al-Mahrusiyah* Kediri: Al-Mahrusiyah Press, 2015.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dan Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendojo. Jakarta: P3M, 1986.
- Zuhri, Saefuddin. *Guruku Orang-orang Pesantren*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.